

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI SUMATERA UTARA
SKRIPSI**

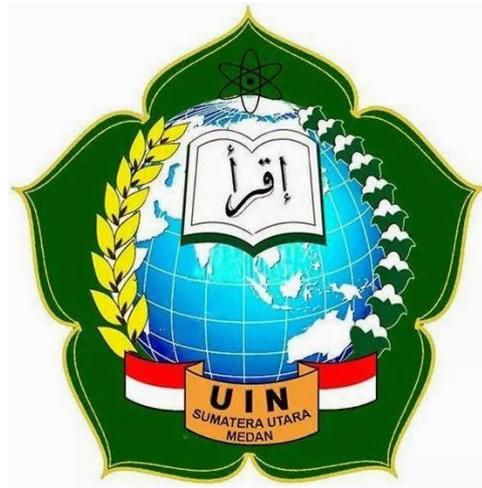
Oleh:

Evelina Lasrianti Aruan

NIM: 51143015

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah**

Oleh:

Evelina Lasrianti Aruan

NIM: 51143015

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evelina Lasrianti Aruan
Nim : 51143015
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 22 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. SM Raja Gg Sumatera No. 30 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Evelina Lasrianti Aruan

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

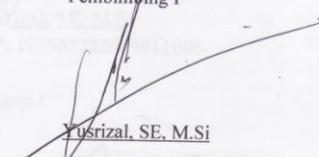
Evelina Lasrianti Aruan

NIM: 51143015

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

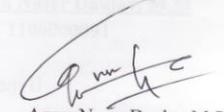
Medan, Oktober 2018

Pembimbing I


Yusrizal, SE, M.Si

NIP. 197505222009011006

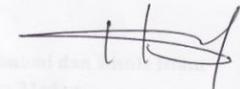
Pembimbing II


Aqwa Naser Daulay, M.Si

NIB. 1100000091

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi


Hendra Hermain, M.Pd

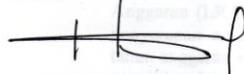
NIP. 197305101998031003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA". Evelina Lasrianti Aruan, NIM. 51143015 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 31 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

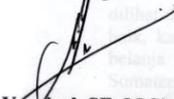
Sekretaris,



Kamila, SE, Ak, M.Si
NIP. 197910232008012014

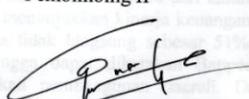
Anggota

Pembimbing I



Yasrizal, SE, M.Si
NIP. 197505222009011006

Pembimbing II



Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB. 1100000091

Penguji I



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1002

Penguji II



Mhd. Iathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIB: 1100000090

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara**” atas nama **Evelina Lasrianti Aruan**. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak **Yusrizal, SE. M.Si** dan Pembimbing II Bapak **Aqwa Naser Daulay, M.Si**.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun anggaran. Dalam pengukuran kinerja keuangan ini lebih terfokus kepada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan untuk mengetahui penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran yang dilakukan selama lima tahun anggaran pada kegiatan-kegiatan yang ada pada instansi itu sendiri. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan rumus: analisis keserasian belanja yang terbagi kepada belanja langsung dan belanja tidak langsung, analisis efektivitas, analisis varians belanja, analisis efisiensi dan analisis pertumbuhan belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016 dilihat dari analisis keserasian belanja menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, karena total keseluruhan belanja tidak langsung sebesar 51% dan untuk belanja langsung sebesar 49%, sehingga dapat dikatakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara kurang memperhatikan pembangunan daerah. Dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2012-2016 dikatakan baik, karena terlihat adanya pertumbuhan belanja selama lima tahun dengan total keseluruhannya sebesar 1%, dengan nilai maksimal 14% pada tahun 2014 dan nilai minimal 3% pada tahun 2015. Dari analisis varians belanja dari tahun 2012-2016 dapat dikatakan baik, dengan total perbandingan keseluruhannya adalah sebesar 89%. Namun dilihat dari rasio efektivitasnya penggunaan anggaran selama lima tahun dapat dikatakan cukup efektif dengan total keseluruhan rasionya mencapai 83%.. Sedangkan jika dilihat dari rasio efisiensinya Bappeda Provinsi Sumatera Utara dikatakan cukup efisien dalam penggunaan anggarannya dari tahun 2012-2016, dengan total keseluruhan sebesar 34%, maka dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah mampu melakukan penghematan anggaran.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, rasio keserasian belanja, efisiensi, efektivitas, dan varians.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA”. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmatan Lil'alamin. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan-masukan berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Untuk orang tua yang tercinta Ayahanda Durrhman Aruan dan Ibunda tercinta Tiur Maida Marpaung yang sampai saat ini telah memberi Do'a, material, kasih sayang serta semangat dan dukungan bagi kehidupan penulis.*
- 2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam **Dr. Andri Soemitra, MA**, dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .*

3. Bapak **Hendra Hermain, M.Pd** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu **Kamilah, S.E. Ak. M.Si** selaku Sekretaris Jurusan.
4. Bapak **Yusrizal, SE, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Aqwa Naser Daulay, M.Si** selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis atas keikhlasannya dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu dalam kesibukan dan jadwal begitu padat, hingga skripsi ini bisa terwujud dan selesai.
5. Ibu **Neila Susanti, MS** sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.
6. Bapak/Ibu Pimpinan, dan Pegawai **Bappeda Provinsi Sumatera Utara**, Khususnya Ibu **Siti Rahma** yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
7. Kakak tercinta **Dian Fadhilah Harahap, SE, Ririn Adrida, SH, Rizki Niati** dan Abang **Muhammad Arfan, S.Pd** yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Teman-teman stambuk 2014 AKS-C, terkhusus sahabat-sahabat **Annisa Rahmadani, S.Akun, Myrna Dwi Tantia, S.Akun, Sri Yani, S.Akun, Tila Soraya, S.Akun, Bunga Rizkina, S.Akun, Dewi Sartika, S.Akun, Atika Nisrina, Ifi Maurizka, Rizka Ariana, Muthiah Amri** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.
9. Teman-teman KKN kelompok 61, terkhususnya **Ellida Mayanti, S.Pd, Masriani, S.Pd, Alwajah Novianti, S.Pd, 'Alimah Tusakdiah, S.Pd, Yuhanna, SE, Elvina Sari Pane, S.Pd, Rani Anggraini, S.Pd** . terima kasih atas motivasi dan semangat serta dukungannya.
10. Adik-adikku yang begitu luar biasa yang selalu mengingatkan dalam hal apapun. Terima kasih untuk kalian **Muhammad Yasir Ramli, Rizka Arifah, Siti Khumairoh, Majdah Maysuni, Feni, Kartika, Zahra, Maysarah,**

Kartika, Nurhalizah, Viddyna, Safta dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Sahabat Aliyah khususnya, **Nur Raudha Hasanah, S.Pd, Suhaidah, S.Pd, Atiah Lailani, S.Pd, Sri Pahla, Shafa Khaira Ulfa, Yuni Prasti, S.Kom, Dewi Widya, Khoirul, Amal Hasibuan, Fadhli Saragih.** Terima kasih atas semangat dan dorongan kalian, dan terima kasih atas kenangan-kenangan kita selama SMA dulu.
12. Serta seluruh Sahabat ku di Majelis Taklim Bustanul Arifin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a kalian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan yang terakhir seluruh Staff Perpustakaan FEBI dan Perpustakaan Kota Medan, yang sangat-sangat membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Tidak adanya nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan penulis kepadanya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa kalian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya serta lindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, 15 Oktober 2018

Penulis

Evelina Lasrian Aruan
NIM. 51.14.3.015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II	KAJIAN TEORITIS
A. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
C. Organisasi Sektor Publik.....	33
D. Pemerintah Dalam Islam.....	41
E. Penelitian Terdahulu.....	43
F. Flowchart Penelitian.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48

F. Analisis Data.....	48
-----------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	53
B. Ringkasan Laporan Keuangan.....	60
C. Hasil Penelitian.....	63
D. Pembahasan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran.....	5
2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja.....	20
2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	20
2.3 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja.....	21
2.4 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....	22
2.5 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi.....	23
3.1 Kriteria Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja.....	49
3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	50
3.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja.....	51
3.4 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi.....	51
3.5 Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja.....	52
4.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	60
4.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah.....	64
4.3 Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja.....	64
4.4 Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja.....	65
4.5 Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.....	67
4.6 Analisis Pertumbuhan Belanja.....	69
4.7 Rasio Efektivitas Belanja.....	71
4.8 Rasio Efisiensi Belanja.....	73
4.9 Analisis Varians Belanja.....	75
4.10 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Bappeda.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Flowchart Penelitian.....	46
4.1 Logo Bappeda Provinsi Sumatera Utara.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana Instansi Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappeda) melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintah, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan, dalam hal ini kesemua aspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dalam proses dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja daerah agar terlaksana.

Dalam pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda ini lebih terfokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintahan tidak lah sama dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi-instansi perusahaan. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Bappeda dalam melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1, menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menyebutkan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, kemudian dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, menyebutkan laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.¹

Sedangkan pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara pemerintah daerah khususnya Bappeda memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik.²

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada periode berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan dalam perencanaan pembangunan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Bappeda dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: *pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor Publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA

² Gede Edy Prasetya, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2005)

komunikasi kelembagaan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.³

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja keuangan tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Karena pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun ada istilah surplus atau defisit pendapatan dan belanja pada anggaran pemerintah daerah.

Penggunaan rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti pada lembaga perusahaan yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan: keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat komersial. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi atau struktur APBD. Dan sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *Incrumental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu, oleh karena itu sering mengabaikan rasio keuangan dalam APBD. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi atau pun struktur APBD nya.

Pengukuran kinerja keuangan ini dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

³Juddy Julian Pilat, *analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, kota manado tahun anggaran 2011-201*. Jurnal Accountabilit. Vol 06 No 01, 2017, h. 46

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan laporan yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Pada dasarnya laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran.⁴

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran merupakan alat penting sebagai perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Maka pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pedoman yang digunakan adalah Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 karena peraturan tersebut mengukur kinerja pemerintah dari segi keuangan. Pengukuran kinerja keuangan lainnya juga dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Keserasian Belanja, salah satunya adalah dengan menilai rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pegawai terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang

⁴ Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2015), h. 121

menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Dan analisis yang digunakan juga untuk mengukur kinerja keuangannya adalah dengan menggunakan analisis varians belanja dan juga pertumbuhan belanja. Dimana analisis varians belanja itu digunakan untuk melihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran, sedangkan analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi
2012	27.912.880.489	25.351.103.508
2013	26.390.286.910	22.277.486.322
2014	28.248.164.495	25.423.923.159
2015	28.053.885.700	24.674.341.241
2016	27.132.037.700	25.105.229.859

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 28.248.164.495 dan Rp 25.423.923.159. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional terjadi peningkatan pada tahun

2014 yaitu sebesar Rp 27.646.164.495, dan untuk belanja modal jumlah anggarannya meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 1.310.840.000.

Jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp27.912.880.489, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp25.351.103.508 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp26.390.286.910, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp22.277.486.322 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp28.248.164.495, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp25.423.923.159 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp28.053.885.700, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp24.674.341.241 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp27.132.037.700, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp25.105.229.859 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran. karena terdapat beberapa hambatan yang menjadi sistem dari penyusunan kinerja keuangan Bappeda seperti kurang efektif dan efisiennya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola. Dari uraian diatas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016 jika dilihat dari analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung?
2. Berapa besar pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016?
3. Berapa besar Rasio Efektivitas pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016?
4. Berapa besar rasio efisiensi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016?
5. Berapa Besar varians belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016 jika dilihat dari analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui seberapa besar rasio efektivitas pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui seberapa besar rasio efisiensi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016.
5. Untuk mengetahui seberapa besar varians belanja pada Bappeda provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media pembelajaran dan juga menambah wawasan penulis tentang kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi pihak kampus, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi fakultas sebagai rujukan untuk melakukan penelitian sejenisnya.
3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan analisis kinerja Bappeda Provsu, dan menjadi masukan agar kinerja Bappeda menjadi lebih baik lagi.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta menjadi pembanding dengan penelitian terdahulu dan menjadi sumbangan pemikiran bagi semua yang membaca.

E. Batasan Istilah

1. Teori organisasi adalah suatu konsep, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang sebab jika

tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

4. Rasio efektivitas dan efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan rasio efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
5. Keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja yang optimal.
6. Varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Analisis

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁵

Analisis berasal dari kata Yunani "*Analisis*" yang berarti melepaskan. Analisis dari dua suku kata yaitu "*Ana*" yang berarti kembali dan "*Luein*" yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisis yaitu suatu usaha untuk mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Secara umum, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungannya antara satu dengan yang lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya, digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang,

⁵ Perpustakaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2010, h. 43

sebagai proses diagnosa terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya.⁶

2. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.⁷

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektivitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan.⁸ Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seseorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan.

Menurut Sudarmanto, kinerja merupakan catatan hasil yang di produksi atau fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Sebagai perilaku kinerja juga merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja.⁹

Sedangkan kinerja dalam pandangan islam dituangkan dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)

⁶ Arfan Ikhsan dkk, *Analisis Laporan Keuangan*, (Medan: Madanetra, 2012), h. 43

⁷ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), H.

5

⁸ Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2002), h. 34

⁹ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 8

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Al-Ahqaf 46:19).¹⁰

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Untuk menilai suatu kinerja maka dilakukan dengan pengukuran terhadap kinerja, untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditergetkan pada saat perencanaan.¹¹ Pengukuran kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk menialai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan cepat.

- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

502 ¹⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), h.

¹¹ Dedi Nordiawan, et, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 158

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer itu, diperlukan perbaikan kinerja secara terus menerus.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman.

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan penghargaan, misalnya: kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi. Atau hukuman, misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran.¹²

Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga maksud:

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi peningkatan atau kemajuan kinerja suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak ketidakpuasan. Dengan

¹²Dedi Nordiawan, et, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 157-

kata lain, kinerja pemerintah kini lebih banyak mendapatkan sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah.

Sedangkan dalam hal perencanaan pembangunan dalam kinerja pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sedangkan dewasa ini rencana pembangunan jangka panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Bahkan masih ada jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh kedepan tentang kerangka pembangunan yang disusun sesuai aspirasi masyarakat secara umum. Perencanaan jangka panjang lebih bersifat makro (menyeluruh) dan tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci. Sedangkan aspek yang dibahas meliputi bidang ekonomi, sosial-budaya, dan tata ruang. Disamping itu dalam perencanaan jangka panjang juga tercakup pentahapan pembangunan untuk masing-masing periode lima tahunan. Hal ini perlu dilakukan agar perencanaan jangka panjang tersebut dapat menjadi acuan terhadap penyusunan perencanaan jangka menengah.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah.

Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif agar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering dinamakan rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).¹³

Sedangkan tujuan diukurnya kinerja pemerintah daerah adalah:

- a) Memperbaiki informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai.
- b) Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan kinerja yang menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
- c) Laporan kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di instansi pemerintah

¹³ Syafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 52-55

untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.¹⁴

3. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan pemerintah yang menyangkut data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu, ataupun usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengolaan pemerintah daerah yang

¹⁴ Wakhyudi, *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*, (Jurnal Ilmiah, 2013)

¹⁵ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: CV Rajawali, 2013), h. 199

¹⁶ Hendro Sumarjo, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 55

transparan, jujur, demokrasi, efektif, dan akuntabel, analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Belanja Daerah. Hasil analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut akan menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan daerah selama periode yang dianalisis. Adapun prosedur dalam menganalisis kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

a. Data Laporan

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis instansi yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku.

b. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c. Membandingkan atau Mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.

5. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹⁷

¹⁷ Mardias mo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 121

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, salah satu faktor tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan.

Sedangkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.¹⁸

6. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi:

a. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

¹⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 230

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

d. Indikator Hasil (*outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

7. Pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya

adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.¹⁹

Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, analisis rasio efektivitas dan efisiensi belanja.

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.

Dapat dikatakan baik dari hasil varians ini adalah apabila pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi belanja. Apabila pemerintah tidak dapat melakukan efisiensi belanja maka dapat dikategorikan adanya indikasi dari kinerja keuangan belanja daerah yang kurang baik atau dikarenakan adanya jumlah realisasi belanja yang lebih besar dari jumlah anggaran yang ditargetkan.

Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, *pertama* hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. *kedua* justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanahkan dalam anggaran. rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:²⁰

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

¹⁹ *Ibid*, h. 231

²⁰ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 157

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

Analisis Varians Belanja cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasa dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:²¹

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea.Belanja } Thn_t - \text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

²¹ *Ibid*, H. 160

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap tidak baik, demikian sebaliknya. Jika belanja pegawai $\geq 50\%$ dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Belanja langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

Analisis ini antara lain:

1) Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Analisis proporsi belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam APBD. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2) Analisis Belanja Langsung

Analisis belanja langsung menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh

instansi pemerintah. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penetapan standar belanja dan standar harga unit. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut:²²

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas Belanja

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:²³

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

²² *Ibid*, h. 165

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 54

e. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisiensi. Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:²⁴

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	81%-90%
Kurang efisien	91%-100%
Tidak efisien	>100%

B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Disini, sumber informasi adalah pemerintah daerah yang bersangkutan.

²⁴ *Ibid*, h. 166

Materi di dalamnya adalah kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada para pemakai. Standar umum pelaporan keuangan tersebut merupakan pedoman penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi masing-masing instansi, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.

1. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang disajikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyariatkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.

- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.²⁵

2. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori:

a) Pendapatan asli daerah

Merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

b) Dana perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.

c) Lain-lain pendapatan yang sah

²⁵ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, h. 6

Adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.

Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a) Belanja Aparatur Daerah

Merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung, dan lain sebagainya.

- b) Belanja Pelayanan Publik

Merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.

- c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

- 3) Pembiayaan

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- b. Neraca

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.²⁶

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ini menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja selama periode tertentu, kebijakan akuntansi yang digunakan penjelasan masing-masing perkiraan laporan keuangan dan informasi tambahan yang diperlukan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan.

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan

²⁶ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabet, 2006), h. 196

pengguna dalam memahami laporan keuangan. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, peminjaman serta pemerintah.

3. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut SFAC No. 4 (*Statement of Financial Accounting Concepts*) Bagi organisasi pemerintah tujuan laporan keuangan adalah:

- 1) Laporan keuangan organisasi pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- 2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya

dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

- 3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- 4) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi pemerintah selama satu periode, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- 5) Memberikan penjelasan untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.²⁷

4. Laporan Keuangan Dalam Konsep Alqur'an

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang bergerak dan giat beramal serta berusaha. Allah berjanji bahwa orang-orang beriman dan mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini berarti semakin sungguh-sungguh seseorang dalam melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan maka akan mendapatkan hasil yang baik.

Dalam Islam juga diatur bagaimana cara mencatat dan melaporkan hutang, yang mana dijelaskan dalam suat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

²⁷ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisa Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 21

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa diantara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa, kata *dain* berasal dari kata *dana-yadinu* yang berarti memberikan (meminjamkan) kepada seseorang uang yang harus dikembalikan (dibayarkan kembali) dalam waktu tertentu yang disepakati bersama

antara yang meminjamkan dengan yang dipinjamkan. Selanjutnya Allah melarang melakukan riba dan menerangkan keburukannya, karena riba itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan, tanpa mengindahkan kesulitan dan kesukaran orang lain.

Pada penggalan berikutnya, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya itu, berapa jumlahnya, syarat dan waktunya. Semuanya ini sebenarnya adalah untuk menghindarkan terjadinya permasalahan dibelakang hari. Jika yang berhutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akalinya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohnya atau karena ada gangguan pada lisannya, atau karena satu dan sebab lainnya, hendaklah walinya mengambil tugas mendiktekan hutang-hutangnya. Lagi-lagi disini ditegaskan, wali yang berperan itu juga harus lah adil.²⁸

Dalam hal pencatatan utang piutang maka harus dihadiri oleh beberapa saksi. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini, persaksian dalam bermu'amalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Adapun syarat menjadi saksi itu adalah, *pertama*, saksi itu hendaklah seorang muslim. Pendapat ini diambil dari kata *min rijalikum*. *Kedua*, saksi itu hendaklah orang yang adil, tidak memihak sehingga tercapai tujuan diadakan persaksian tersebut.

Sayyid Quthub mengatakan, kandungan ayat ini berkenaan dengan hukum-hukum khusus mengenai hutang piutang, perdagangan, dan gadai ini adalah untuk melengkapi hukum-hukum di muka yang berkenaan dengan sedekah dan riba. Dijelaskan juga bahwa perintah menulis adalah fardhu yang berdasarkan nash dan ditujukan kepada pihak ke tiga.²⁹

Dengan kata lain orang yang menuliskan hutang piutang itu sebagai sekretaris. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah

²⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat ekonomi Al-Qur'an*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2014), H. 242-244

²⁹ Sayyid Qutuhub, *Fi Zhilal Al-Qur'an, Juz 1*, h. 334

pihak yang bertransaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar, tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati.

Untuk lebih memperkuat ayat diatas maka peneliti mencantumkan sabda Rasulillah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.”* (Muttafaq 'alaih).

Kesimpulan dari Surat Al-Baqarah dan sabda Rasulullah tersebut dapat kita ketahui bahwa barang siapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam waktu yang ditentukan pula. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat 282 sebagai perintah apabila mereka berhutang-piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang dengan cara pencatatan atau dalam laporan keuangan yang benar agar tidak menimbulkan keraguan yang dianjurkan dalam Islam, dan kita juga dianjurkan untuk berbuat jujur atas segala kegiatan dan juga pencatatan setiap transaksi hutang piutang.

C. Organisasi Sektor Publik

1. Pengertian Organisasi

Organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi

dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisiensi.³⁰

Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³¹ Pengertian lain dari organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.³²

Salah satu ciri *utama* dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ciri yang *kedua* adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, sasaran, dan tujuan. Ciri yang *ketiga* adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan.

Setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Tujuan bersama yang hendak direalisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah berarti suatu tempat orang berinteraksi dan bekerja sama. Sedangkan organisasi dikatakan sebagai alat berarti sebagai alat untuk merealisasikan tujuan bersama diantara orang yang berinteraksi dan bekerja sama tersebut.³³

2. Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok dan struktur

³⁰ Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen*, (Medan, 2016), h. 74

³¹ Sondang P. Sinaga, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 60

³² Ernie Tisnawati Sule, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 50

³³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) h. 73- 74

dalam organisasi, dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi.

Menurut Mulyadi perilaku organisasi adalah aktualisasi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana orang bertindak di dalam organisasi.³⁴

Menurut Hanggreni perilaku organisasi adalah sebuah bidang khusus yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum mencakup tiga faktor penentu perilaku dalam organisasi. Individu, kelompok, dan struktur serta penerapannya untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif.³⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi pada hakikatnya adalah merupakan bidang studi lintas disiplin yang mempelajari tentang bagaimana memperbaiki sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Jenis-Jenis Organisasi

Adapun jenis-jenis organisasi sektor publik diantaranya adalah:

a. Organisasi Komersial (*Profit Making Organization*)

Organisasi komersial sering disebut juga sebagai organisasi niaga/organisasi laba, karena organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi komersial dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran organisasi tersebut beserta orang-orang yang terlibat didalamnya. Contoh organisasi ini adalah: Persero Terbatas (PT), Persero Komanditer (CV), Firma, dan Koperasi.

b. Organisasi Sosial (*Non-Profit Organization*)

Organisasi ini sering disebut juga organisasi kemasyarakatan, karena perkumpulan sosial ini dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia

³⁴ Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, ct. 1, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 11

³⁵ Hanggreni, *Teori Perilaku keorganisasian*, ct. 1, (Yogyakarta: Penerbit Caps, 2015), h.

membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Pada awalnya organisasi sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Adapaun jenis organisasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1). Organisasi Formal (Resmi)

Organisasi formal atau resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya, serta memiliki kekuasaan hukum. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Contoh organisasi sosial bersifat formal adalah sekolah negeri, masjid, organisasi jasa sukarelawan, rumah sakit, organisasi politis, instansi pemerintahan, dll.

2) Organisasi Informal (Tidak Resmi)

Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antara anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama.

Organisasi sektor publik dapat dikatakan jenis organisasi sosial yang tergolong dalam organisasi formal karena berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan ataupun kemashlahatan masyarakat yang memiliki kekuasaan hukum. Berbeda dengan organisasi komersial yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi sektor publik sendiri terdiri atas banyak organisasi. Secara umum organisasi sektor publik dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu organisasi yang berbentuk pemerintah atau instansi pemerintah, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen, serta

organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah, seperti yayasan, partai politik dan lain-lain.

Salah satu organisasi yang di bahas dalam teori ini adalah organisasi yang berbentuk pemerintah atau instansi pemerintah. Karena pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Secara umum, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempitnya adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

Seperti halnya yang tertuang dalam Al-Qur'an, kepemimpinan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Islam telah menurunkan nilai-nilai mengenai kepemimpinan dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21):73 yang berisi sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِ نَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

الزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.(QS. Al-Anbiya (21):73)³⁶

Dalam QS. Al-Anbiya (21):73 tersebut dapat diketahui bahwasannya ayat ini berbicara pada tingkatan ideal sosok seorang pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang tercermin pada diri para nabi pilihan Allah. Ayat ini merupakan sebuah landasan prinsip dalam mencari sosok pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Al- Qur'an

³⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), h. 328

menghubungkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dalam hal keilmuan maupun perbuatan, dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan.

Yang dimaksud dalam pemerintah disini adalah:

a) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Konteks pemerintah pusat juga meliputi lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tinggi negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai amandemen keempat dan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundangan turunannya, salah satunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Adapun kewenangan pemerintah pusat adalah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi, dan lebih banyak pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan, berkisar pada pembuatan kebijakan, penetapan norma, standarisasi dan pembinaan serta pengawasan.

b) Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara itu pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Di tingkat provinsi, struktur pemerintah daerah terdiri atas beberapa organisasi sebagai berikut:

1) Sekretaris daerah

Tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris daerah dipilih oleh sekretaris daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

2) Sekretaris DPRD

Tugasnya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD yang bertanggung jawab secara administratif kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

3) Inspektorat

Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Instansi ini dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah dan mendapat pembinaan secara teknis dari sekretaris daerah.

4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tugasnya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Organisasi ini dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

5) Dinas Daerah

Tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Dinas daerah dipimpin oleh kepala

dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung pada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Unit pelaksana teknis dinas dapat dibentuk pada dinas daerah untuk membantu melaksanakan sebagian kegiatan operasional atau kegiatan teknis penunjang yang memiliki beberapa wilayah kerja.

6) Lembaga Teknis Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan dipimpin oleh camat yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

7) Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.³⁷

4. Tujuan Organisasi Sektor Publik

Tujuan merupakan suatu hasil akhir yang ingin dicapai oleh orang-orang yang berhimpun di dalam sebuah organisasi. Ada beberapa macam tujuan dari organisasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Kemasyarakatan

Organisasi yang berorientasi pada tujuan kemasyarakatan lebih menempatkan organisasi itu kedalam masyarakat, demi mencapai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan Keluaran

Merupakan tujuan organisasi yang berbentuk keluaran-keluaran tertentu sebagai fungsi dari konsumen. Contohnya barang-barang yang dibutuhkan, jasa-jasa, dan lain-lain.

³⁷ Deddy Nordiawan, et, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta:Salemba Empat, 2011), h. 49

c. Tujuan Sistem

Merupakan sebuah tujuan yang lebih mengutamakan untuk memperbaiki, mengevaluasi, atau bahkan merubah suatu sistem yang dirasa perlu.

d. Tujuan Produk

Yaitu sebuah tujuan yang hampir sama dengan tujuan keluaran. Tetapi, tujuan produk lebih mengutamakan karakteristik barang-barang/jasa-jasa produksi.

e. Merupakan tujuan yang digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan yang lainnya.

Adapun tujuan organisasi secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien, karena dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Sebagai wadah dalam menambah pergaulan.
- 3) Wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama.
- 4) Mendapatkan jabatan dan melakukan pembagian kerja.
- 5) Sebagai wadah untuk mendapatkan penghargaan.
- 6) Mengembangkan sumber daya dan teknologi secara bersama-sama.³⁸

D. Pemerintah Dalam Islam

1. Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Sistem pemerintah yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentan waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan Khilafah, imamah, monarki, dan demokrasi.

Khilafah adalah pemerintah Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilifahan adalah Islam sebagai agama.pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai

³⁸*Ibid*, 75

wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhilafaan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin didunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin.³⁹

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial. Tentu saja kedua sistem ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai variasi, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian sistem pemerintah dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.⁴⁰

Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madina beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya Rasul mendelegasi tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Dari sebagian contoh praktek pemerintah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan sunnah beliau termasuk piagam Madina. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa praktek pemerintah yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam

³⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah Dokrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 204-205

⁴⁰ Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 72

Madina beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang bebrarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan salah satu mekanisme pemerintah yang penting adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.

2. Tugas dan Tujuan Pemerintah

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin-ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Paradigma pemikirannya ini banyak disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Tidak berbeda dari pendahulunya, Ibn Khaldun menyatakan sesungguhnya kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Kehidupan manusia di dunia ini adalah satu *marhalah* yang dijalani menuju kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia, maka imamah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴¹

Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.⁴²

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah*, h. 259.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007), hlm. 134.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi tentang Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata dibawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.⁴³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hony Andhiantoko tentang Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten blora (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora tahun 2007 - 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih ter golong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17%, Rasio Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% , Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar

⁴³ Bahrin Assidiqi, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun 2008-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.⁴⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wandira tentang Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada BAPPEDA Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Analisis Varians Belanja pada tahun 2008 adalah 89,12%, tahun 2009 adalah 48,13%, tahun 2010 adalah 76,54%, tahun 2011 adalah 69,67% dan tahun 2012 adalah 62,44%. Dari Analisis Pertumbuhan belanja pada tahun 2008-2009 adalah 49,5%, pada tahun 2009-2010 adalah 19,93%, pada tahun 2010-2011 adalah 34,04% dan pada tahun 2011-2012 adalah 5,95. Dari Analisis Keserasian Belanja serta Analisis Efektivitas dan Efisiensi diharapkan agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Dalam hal efisiensi belanja Bappeda agar lebih mantap dalam meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai seterusnya.⁴⁵

F. Flowchart Penelitian

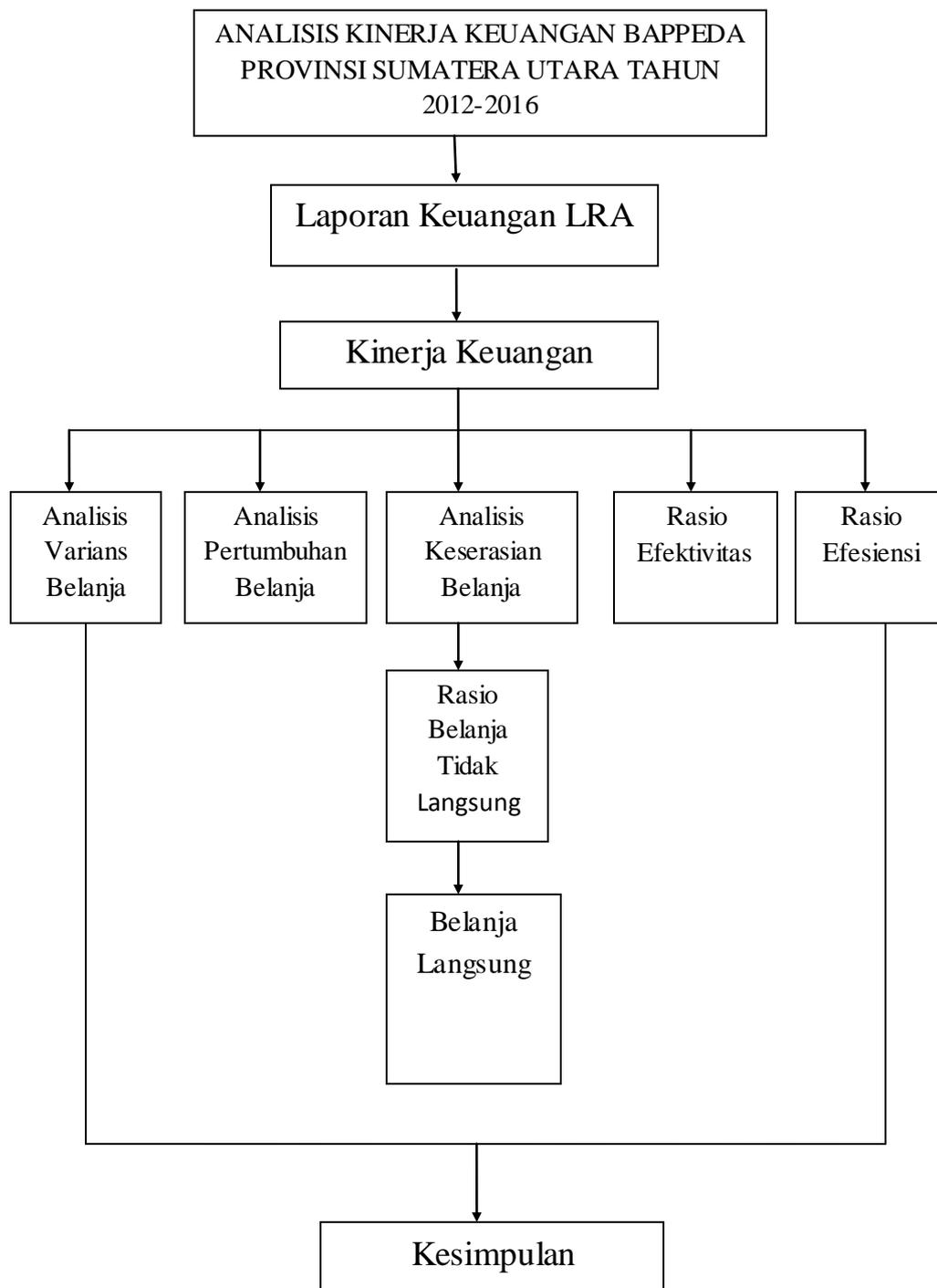
Setiap Instansi memiliki Laporan Keuangan yang berfungsi untuk mencatat semua aktivitas pada instansi. Laporan keuangan akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan keuangan yang telah ada akan dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan pada Bappeda Provinsi Sumatera. Analisis yang dilakukan adalah dapat berupa analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari beberapa rasio, misalnya Analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja yang terdiri dari rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, rasio efektivitas dan rasio efisiensi belanja. Hasil dari analisis rasio ini akan memperlihatkan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara apakah mampu meningkatkan kinerjanya dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari

⁴⁴ Hony Andhiantoko, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora Tahun 2007-2011*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013

⁴⁵ Ayu Wandira, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, 2015

masing-masing perhitungan Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan beberapa macam analisis rasio yang sudah dijelaskan diatas.

Gambar 2.1: Flowchart Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan di analisis lalu ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016, data dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Ponegoro No. 21-A.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan September – Oktober 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian yang menjadi pusat penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama lima tahun Anggaran dari tahun 2012-2016.

D. Jenis dan Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁴⁶ data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016. Sumber data yang digunakan berasal dari kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan mencari data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi dengan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari Bappeda Provinsi Sumatera Utara berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Struktur Organisasinya. Sedangkan, data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016.

Teknik selanjutnya adalah dokumentasi, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan judul yang diajukan, sebagai landasan teori sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan judul yang diajukan.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.⁴⁷

berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan

⁴⁶ Ulber Silalahan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009), h. 291.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 34

konsep anggaran khususnya analisis belanja kita dapat membuat analisis anggaran antara lain:

1. Analisis Keserasian Belanja, terdiri dari:
 - a. Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
 - b. Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Rasio Efektivitas Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Analisis Varians Belanja

1) Analisis Keserasian Belanja

Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Adapun kriterianya sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Belanja langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

Analisis ini antara lain:

a) Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tidak langsung pada tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b) Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja yang ada pada realisasi. Menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea.Belanja } Thn_t - \text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

3) Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efektivitas belanja sebagai berikut:

Rumus Pengukuran Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriterianya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Rumus Pengukuran Efisiensinya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriterianya adalah:

Tabel 3.4

Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	81%-90%
Kurang efisien	91%-100%
Tidak efisien	>100%

4) Analisis Varians Belanja

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Adapun kriterianya adalah:

Tabel 3.5

Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Instansi

a. Periode BAKOPDA

Secara pemerintah orde lama diganti oleh pemerintah orde baru yang secara konkrit berusaha meningkatkan pembangunan daerah agar kesejahteraan rakyat lebih diutamakan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, maka pemerintah melihat pentingnya suatu lembaga yang dapat menyusun program-program pembangunan yang menyeluruh dengan menitikberatkan pembangunan terutama pembangunan prasarana umum seperti membuat jalan, jembatan, dan prasarana pertanian rakyat. Untuk menyusun program-program pembangunan nasional maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di pusat, Bappeda Tingkat 1 penyusun suplemen Perencanaan Nasional di Tingkat 1 Penyusun Komplementer di tingkat kabupaten/kota madya.

Pada tahun 1963 di Sumatera Utara dibentuk suatu Badan Koordinasi Pembangunan Sumatera Utara (BKPDUSU) yang langsung diketuai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dan Sekretaris residen yang waktu itu dijabat oleh P.R Telaunbanua yang merupakan badan yang mengkoordinir pembangunan di daerah yang selanjutnya diganti menjadi Badan Koordinir Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAKOPDASU yang diketahui oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Ketua Harian Residen P. R. Telaunbauna dan Sekretaris Sutan Sitompul, kemudian Badan Koordinir Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAKOPDASU) yang merupakan badan yang pertama kali mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah Sumatera Utara yang diketahui oleh Ir. M. Sipahutar dan sekretaris oleh Netap Bukit. Pada periode ini telah disusun draft Repelita 1 Provinsi Sumatera Utara.

BAKOPDASU berperan sebagai lembaga yang pertama menangani masalah-masalah yang menyangkut program pembangunan di daerah dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 (PELITA I). Pada periode ini telah diberlakukan

Inpers Tingkat I yang menyangkut program pembangunan jalan dan jembatan di daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

b. Periode Kepmendagri & Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000

Sesuai era reformasi dan Otonomi Daerah yang mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri dan OTDA No. 50 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tugas pokok dan fungsi pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara No. 061.1s-433. K/Tahun 2002.

Dengan terbitnya keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061.1s-433. K/Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002. Tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda Sumatera Utara telah berubah, perubahan susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Tingkat I Sumatera Utara lain:

Bappeda Tingkat I Dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua berubah menjadi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala, dan seterusnya.

2. Visi dan Misi BAPPEDA

Dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya, Bappeda Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi dan misi sebagaimana yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Visi Bappeda:

“menjadikan badan perencanaan yang handal dalam peningkatan pembangunan daerah menuju Sumatera Utara yang maju, sejahtera dan harmonis dalam keberagaman”.

Misi Bappeda:

Misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan perencanaan yang lebih inovatif adalah melalui:

- a. Mengembangkan perencanaan pembangunan daerah sesuai urusan perencanaan termasuk mengurangi kesenjangan antar wilayah/daerah melalui peningkatan profesionalitas aparat dan inovasi teknologi.

- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan memperhatikan keperdulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan Sumatera Utara yang maju, sejahtera dan harmoni dalam keberagamaannya.

3. Ruang Lingkup Bidang kegiatan

Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sejalan dengan program Pemerintah Sumatera Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMB), maka program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Program perencanaan pembangunan daerah.
- c. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
- d. Program perencanaan sosial budaya.
- e. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- f. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
- g. Program pengembangan penelitian dan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- h. Program peningkatan kerjasama perencanaan dan pembangunan daerah.
- i. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- j. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

4. Logo dan Struktur Organisasi

a. Logo dan Makna

Logo atau lambang adalah suatu tanda (seperti lukisan perkataan, lencana dan sebagainya) yang menyatakan sesuatu hal atau maksud tertentu, Logo BAPPEDA sama dengan logo Pemerintahan Sumatera Utara seperti logo Kantor Gubernur jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Logo Bappeda Provinsi Sumatera Utara Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara



Berikut ini akan dijelaskan makna dari logo tersebut:

Warna utama yang dipakai adalah biru, merah, putih, hijau dan kuning emas yang terdiri dari:

- 1) Padi dan kapas menggambarkan lambang pemerintah yang berupa mengisi kemerdekaan dengan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- 2) Bintang menggambarkan bahwa PEMPROVSU dalam melaksanakan tugas tidak ditujukan hanya terhadap kehidupan duniawi saja tetapi tidak terlepas dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Gunung menggambarkan posisi Sumatera Utara yang dikelilingi oleh bukit barisan dan juga menggambarkan pertahanan dan pondasi pemerintah yang kuat.
- 4) Rantai menggambarkan bahwa pemerintah dan rakyat bersatu saling tolong menolong melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara.
- 5) Tangan menggambarkan bahwa pemerintah selalu siap untuk melindungi rakyat dan membantu rakyat.
- 6) Warna hijau melambangkan daerah Sumatera Utara yang subur dan kaya dengan hasil pertaniannya.

- 7) Pita kuning menggambarkan semangat dan cita-cita pemerintahan dalam pita tersebut tertulis: Tekun, Berkarya, Hidup, Sejahtera, Mulia, Berbudaya.

b. Struktur Organisasi Instansi

Bappeda adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara serta penilaian atas pelaksanaannya.

Badan berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan perda No. 4 Tahun 2001 dan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061.-433 K/Tahun 1980. Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas maka diperlukan sistem organisasi dan manajemen yang sangat mantap.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

1. Kepala.
2. Wakil Kepala.
3. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Organisasi dan Hukum.
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pertanian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
 - 3) Sub Bidang Koperasi dan Jasa.
 - 4) Sub Bidang Industri, Sumber Daya Alam dan Kemaritiman
5. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan.

- 2) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Komunikasi.
 - 3) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Budaya.
 - 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Perhubungan.
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 3) Sub Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air.
 - 4) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan.
7. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
 - 2) Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.
8. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengumpulan Data Statistik.
 - 2) Sub Bidang Evaluasi.
 - 3) Sub Bidang Informasi.
 - 4) Sub Bidang Peragaan.

B. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012		2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	27.912.880.489	25.351.103.508	26.390.286.910	22.277.486.322
Belanja Operasional	27.001.129.889	24.461.925.508	25.730.428.910	21.769.021.322
1. Belanja pegawai	14.500.340.568	13.211.357.708	14.330.178.450	11.283.471.322
2. Belanja Barang dan Jasa	12.500.789.321	11.250.567.800	11.400.250.460	10.485.550.000
Belanja Modal	911.750.600	889.178.000	659.858.000	508.465.000
1. Peralatan dan Mesin	711.250.600	700.500.000	650.358.000	500.230.000
2. Aset Tetap lainnya	200.500.000	198.678.000	9.500.000	8.235.000

Uraian	2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	28.248.164.495	25.423.923.159	28.053.885.700	24.674.341.241
Belanja Operasional	27.646.164.495	24.833.854.109	27.047.335.700	23.673.531.241
1. Belanja pegawai	15.090.558.495	13.085.490.309	14.606.784.000	13.241.388.780
2. Belanja Barang dan Jasa	12.555.606.000	11.748.363.800	12.440.551.700	10.432.142.461
Belanja Modal	602.000.000	590.069.050	1.006.550.000	1.000.810.000
3. Peralatan dan Mesin	594.000.000	582.280.950	803.550.000	798.410.000
4. Aset Tetap lainnya	8.000.000	7.788.100	203.000.000	202.400.000

Uraian	2016	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	27.132.037.700	25.105.229.859
Belanja Operasional	25.821.197.700	23.886.854.859
5. Belanja pegawai	11.775.551.000	10.933.359.095
6. Belanja Barang dan Jasa	14.045.646.700	12.953.495.764
Belanja Modal	1.310.840.000	1.218.375.000
7. Peralatan dan Mesin	1.302.840.000	1.210.375.000
8. Aset Tetap lainnya	8.000.000	8.000.000

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 28.248.164.495 dan Rp 25.423.923.159. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional terjadi peningkatan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 27.646.164.495, dan untuk belanja modal jumlah anggarannya meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 1.310.840.000.

Jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp27.912.880.489, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp25.351.103.508 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp26.390.286.910, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp22.277.486.322 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp28.248.164.495, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp25.423.923.159 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp28.053.885.700, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp24.674.341.241 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp27.132.037.700, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp25.105.229.859 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Keserasian Belanja

Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka dianggap tidak baik. Jika belanja pegawai > 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik. Demikian pula sebaliknya.

Keserasian belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.

Analisis ini dapat dihitung dengan:

a. Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:

1. Baik : Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung
2. Tidak Baik : Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung

Rumus pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah
Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2012	27.912.476.015	25.351.103.508	13.211.357.708	12.139.745.800
2013	26.390.286.910	22.277.486.322	11.283.471.322	10.994.015.000
2014	28.248.164.495	25.423.923.159	13.085.490.309	12.338.432.850
2015	28.053.885.700	24.674.341.241	13.241.388.780	11.432.952.461
2016	27.132.037.700	25.105.229.859	10.933.359.095	14.171.870.764

Data Perkiraan Anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Perhitungan dengan rumus Analisis Keserasian Belanja dengan berdasarkan pada tabel 4.2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Total Belanja Langsung	Total Belanja	Rasio (%)
2012	12.139.745.800	25.351.103.508	48%
2013	10.994.015.000	22.277.486.322	49%
2014	12.338.432.850	25.423.923.159	49%
2015	11.432.952.461	24.674.341.241	46%
2016	14.171.870.764	25.105.229.859	56%
Total	61.077.016.875	122.832.084.089	49%

Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Analisis Keserasian Belanja jika dilihat dari Belanja Langsung terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja terjadi pada tahun 2016 dengan mencapai tingkat persentase tertinggi yaitu 56%, sedangkan penurunan Balanja Lansung Terhadap Total Belanja terjadi pada tahun 2015 dengan tingkat persentase terendah yaitu sebesar 46%. Di tahun 2012 Analisis

Belanja Langsung yang ditunjukkan pada hasil analisis menunjukkan pada angka persentase sebesar 48% dari total anggaran Rp. 25.351.103.508, pada tahun 2013 menunjukkan angka persentase sebesar 49% dari total anggaran Rp. 22.277.486.322, pada tahun 2014 menunjukkan angka persentase sebesar 49% dari total anggaran Rp. 25.423.923.159, pada tahun 2015 menunjukkan angka persentase sebesar 46% dengan total anggaran Rp. 24.674.341.241, dan pada tahun 2016 menunjukkan angka persentase sebesar 56% dengan total anggaran sebesar Rp. 25.105.229.859. Total keseluruhan belanja langsung adalah 49%.

a. Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Rumusny adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan dengan menggunakan analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja berdasarkan tabel 7 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Rasio (%)
2012	13.211.357.708	25.351.103.508	52%
2013	11.283.471.322	22.277.486.322	51%
2014	13.085.490.309	25.423.923.159	51%
2015	13.241.388.780	24.674.341.241	54%
2016	10.933.359.095	25.105.229.859	44%
Total	61.755.067.214	122.832.084.089	51%

Data Hasil Olahan

Dapat dilihat jika perubahan dan struktur total belanja tidak langsung tidak begitu banyak mengalami perubahan dan kenaikan. Perubahan rasio terlihat tidak begitu jauh. Kenaikan yang ada pada Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja pertahunnya dapat dikatakan dari tahun 2012 sampai 2016 tidak tetap, selalu ada perubahan pertahunnya.

Pada tahun 2012 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung berada pada persentase 52% dengan total belanja sebesar Rp. 25.351.103.508.

Pada tahun 2013 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 51% dengan total belanja sebesar Rp. 22.277.486.322.

Pada tahun 2014 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung mengalami persamaan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 51%, hal ini tidak menambah total belanja dan juga tidak mengurangi total belanja.

Pada tahun 2015 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung mengalami kenaikan, yaitu sekitar 54% atau sebesar Rp. 24.674.341.241.

Pada tahun 2016 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung mengalami penurunan, yaitu sekitar 44% atau sekitar Rp. 25.105.084.089.

Dari tabel dan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa total belanja daerah dalam lima tahun anggaran mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu sekitar 54%, dan penurunan terjadi pada tahun 2016 sekitar 44%. Dan total belanja seluruhnya yaitu sekitar 51% atau sebesar Rp. 122.832.084.089.

Tabel 4.5
Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Belanja Langsung (%)	Belanja Tidak Langsung (%)	Total (%)
2012	48	52	100
2013	49	51	100
2014	49	51	100
2015	46	54	100
2016	56	44	100
Total	49	51	100

Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 penggunaan anggaran terfokus pada belanja tidak langsung. Dimana belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Di tahun 2012 pengguna pada alokasi pembiayaan belanja tidak langsung sebesar 52% atau sekitar Rp. 13.211.357.708, dengan total persentase untuk belanja langsung adalah sebesar 48% atau sekitar Rp. 12.139.745.800, dari total anggaran belanja dalam APBD. Pada tahun ini keserasiannya dikatakan tidak baik, karena persentase belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung.

Di tahun 2013 pengguna pada alokasi pembiayaan belanja tidak langsung mengalami penurunan menjadi 51% atau sekitar Rp. 11.283.471.322 yang diikuti dengan penurunan total anggaran. sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung berada pada persentasenya sebesar 49% atau sekitar Rp. 10.994.015.00. pada tahun ini juga mengalami persamaan dengan tahun sebelumnya, dari tingkat persentasenya penggunaan anggaran terfokus kepada belanja tidak langsung, dan pada tahun ini juga dikatakan tidak baik.

Di tahun 2014 pengguna pada alokasi pembiayaan belanja tidak langsung tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, tingkat persentase sama seperti pada tahun 2013 yaitu sebesar 51% atau sekitar Rp. 13.085.490.390, sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung juga sama tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, tingkat persentasenya sebesar 49% atau sekitar Rp12.338.432.850. Dan pada tahun ini keserasian belanjanya juga dapat dikatakan tidak baik.

Di tahun 2015 pengguna alokasi belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 54% atau sekitar Rp. 13.241.388.780, sedangkan untuk alokasi belanja langsung berada pada persentase 46% atau sekitar Rp. 11.432.952.461. Pada tahun ini juga dikategorikan tidak baik, karena sekitar 8% anggaran di alokasikan untuk belanja tidak langsung dan lebih banyak dari pada tahun sebelumnya.

Di tahun 2016 pengguna alokasi belanja tidak langsung mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 44% atau sekitar Rp. 10.933.359.095, sedangkan untuk alokasi belanja langsung berada pada persentase sebesar 56% atau sekitar Rp. 14.171.870.764. Jika dilihat dari kriteria analisis keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka pada tahun ini dapat dikatakan baik dalam hal penggunaan anggaran. Sebab terjadinya penurunan terhadap belanja tidak langsung, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah memfokuskan penggunaannya untuk pembiayaan belanja langsung.

Untuk penggunaan pada pembiayaan belanja langsung sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran pertahunnya. Karena belanja ini sangat berhubungan langsung dengan kegiatan operasional instansi. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran, penggunaan anggaran dapat dinilai baik pada tahun 2016 dan selama empat tahun nya dinilai tidak baik yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Karena, persentase belanja tidak langsung lebih tinggi dari pada persentase belanja langsung. berarti dalam hal ini penggunaan anggaran di Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan tidak baik selama empat tahun anggaran dan

dikatakan baik pada tahun 2016. Dan jika dilihat dari total keseluruhan penggunaan anggarannya maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara dikatakan tidak baik dalam penggunaan anggaran belanjanya karena masih terfokus kepada belanja tidak langsung.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Kriteria pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut:

- a. Naik : Positif
- b. Turun : Negatif

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea.Belanja } Thn_t - \text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja dengan berdasarkan tabel 4.1, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Analisis Pertumbuhan Belanja
Tahun Anggaran 2012-2016

Uraian	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Total
Realisasi Belanja Tahun $t-1$	23.838.350.166	22.277.486.322	25.423.923.159	24.674.341.241	96.214.100.888
Realisasi Belanja Tahun t	22.277.486.322	25.423.923.159	24.674.341.241	25.105.229.859	97.480.980.581
Kenaikan/ Penuruna n	(1.560.863.844)	3.146.436.837	(749.581.918)	430.888.618	1.266.879.693

%	(7%)	14%	(3%)	2%	1%
---	------	-----	------	----	-----------

Data Hasil Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja mengalami penurunan dan bernilai negatif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.560.863.844, dengan persentase bernilai negatif sebesar 7% dari Pagu Anggaran yang tersedia pada realisasi belanja di tahun 2012 dan 2013.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp. 3.146.436.837, dengan persentase sebesar 14%.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 kembali mengalami penurunan dengan persentase bernilai negatif yaitu sebesar 3% dan pada tahun ini juga terjadi pengurangan pertumbuhan belanja sebesar Rp. 749.581.918.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif. Dengan di tunjukkannya angka persentase sebesar 2% dan terjadi penambahan pertumbuhan anggaran sebesar Rp. 430.888.618. Dapat dikatakan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun anggaran mengalami kenaikan dan penurunan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari penambahan dan pengurangan jumlah anggaran. jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 1% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.266.879.693.

3. Rasio Efektivitas Belanja

Rasio efektivitas digunakan untuk membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900-327 tahun 1996, kriteria efektivitas belanja sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : lebih dari 100%
- b. Efektif : 90-100%

- c. Cukup efektif : 80-90%
- d. Kurang efektif : 60-80%
- e. Tidak efektif : dibawah 60%

Rumus pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efektivitas dengan berdasarkan pada tabel 4.1, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rasio Efektivitas Belanja
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas
2012	27.912.880.489	25.351.103.508	91%
2013	26.390.286.910	22.277.486.322	84%
2014	28.248.164.495	25.423.923.159	90%
2015	28.053.885.700	24.674.341.241	88%
2016	27.132.037.700	25.105.229.859	93%
Total	137.737.255.294	122.832.084.089	89%

Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2012-2016 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara terus mengalami fluktuasi. Yang artinya terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, terutama dalam penganggaran perwujudan dari realisasi anggaran itu sendiri.

Di tahun 2012 tingkat efektivitas dari anggaran belanja berada pada persentase 91% yang menunjukkan angka kisaran Rp. 25.351.103.508, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif.

Di tahun 2013 mengalami penurunan sekitar 7% dengan persentase hanya sekitar 84% yang berada pada kisaran Rp. 22.277.486.322, penurunan ini juga di ikuti penurunan realisasi anggaran, dan penurunan ini merupakan penurunan terbanyak yang pernah dialami oleh Instansi, meskipun mengalami penurunan

yang banyak tetapi tidak mengurangi nilai ke efektivitasan pengguna anggaran pada instansi, di tahun ini dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efektif.

Di tahun 2014 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 90% yang menunjukkan angka kisaran Rp. 25.423.923.159, pada tahun ini penggunaan anggaran dapat dikatakan efektif.

Di tahun 2015 pengguna anggaran belanja sekitar 88% dengan kisaran Rp. 24.674.341.241. penurunan juga terjadi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 2%. Meskipun begitu pengguna anggaran di tahun ini dapat dikatakan cukup efektif.

Ditahun 2016 pengguna anggaran belanja sekitar 93% dengan kisaran Rp. 25.105.229.859. merupakan tingkat kenaikan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan diikuti dengan kenaikan realisasi anggaran. di tahun ini pengguna anggaran dapat dikatakan efektif.

Efektivitas yang ditunjukkan berdasarkan perhitungan dan kriteria yang ditetapkan memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam periode tahun ke tahun. Pada lima tahun anggaran ini, pengguna anggaran dikategorikan efektif dan cukup efektif dengan persentase sebesar 89%. Artinya adalah bahwa realisasi anggaran yang ditetapkan sudah terpenuhi dari target yang ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di instansi sudah maksimal dalam hal pelaksanaannya.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja dan juga untuk melihat tingkat penghematan anggaran yang di lakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : kurang dari 60%
- b. Efisien : 60% - 80%
- c. Cukup efisien : 81% - 90%
- d. Kurang efisien : 91% - 100%
- e. Tidak efisien : lebih dari 100%

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi dengan berdasarkan pada tabel 4.1, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rasio Efisiensi Belanja
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Anggaran	Belanja Langsung	Rasio Efisiensi
2012	27.912.880.489	12.139.745.800	43%
2013	26.390.286.910	10.994.015.000	42%
2014	28.248.164.495	12.338.432.850	44%
2015	28.053.885.700	11.432.952.461	41%
2016	27.132.037.700	14.171.870.764	52%
Total	137.737.255.294	46.919.317.981	34%

Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 tingkat efisiesni pengguna anggaran berada pada persentase 43% dengan pengguna anggaran sekitar Rp. 12.139.745.800, dari total anggaran yang ada dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2012 sangat efisien.

Pada tahun 2013 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 42% dengan pengguna anggaran sekitar Rp. 10.994.015.000, pada tahun ini terjadi penurunan anggaran sekitar 1% hal ini lebih baik dari tahun sebelumnya dalam hal penghematan anggaran. pada tahun ini pengguna anggaran dapat dikatakan sangat efisien.

Pada tahun 2014 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 44% dengan pengguna anggaran sekitar Rp. 12.338.432.850, pada tahun ini terjadi kenaikan 2% dari tahun sebelumnya, meskipun kurangnya dalam penghematan anggaran pada tahun ini tetapi jika dilihat dari perhitungan dan kriteria efisiensi belanjanya maka dapat dikatakan sangat efisien dalam hal penggunaan anggaran.

Pada tahun 2015 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 41% dengan pengguna anggaran sekitar Rp. 11.432.952.461. pada

tahun ini terjadi penurunan sebesar 3% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti dengan penurunan anggaran, hal ini jauh lebih baik dalam hal penghematan anggaran yang dilakukan oleh instansi pada tahun 2015 dan dapat dikatakan sangat efisien.

Pada tahun 2016 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 52% dengan pengguna anggaran sekitar Rp. 14.171.870.764. jika dilihat dari tahun sebelumnya tingkat persentase di tahun ini jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran yang mengalami kenaikan masih dalam batas yang baik, artinya penggunaan anggaran masih dapat dikatakan sangat efisien di tahun ini.

Dari tabel perhitungan di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2012-2018 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk lima tahun tersebut. Dengan demikian Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah dijalankan.

5. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Kriteria dalam perhitungan analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

- a. Baik : Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
- b. Kurang baik : Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran}$
--

Tabel 4.9
Analisis Varians Belanja
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	Perbandingan (%)
2012	27.912.880.489	25.351.103.508	(2.561.776.981)	91%
2013	26.390.286.910	22.277.486.322	(4.112.800.588)	84%
2014	28.248.164.495	25.423.923.159	(2.824.241.336)	90%
2015	28.053.885.700	24.674.341.241	(3.379.544.459)	88%
2016	27.132.037.700	25.105.229.859	(2.026.807.841)	93%
Total	137.737.255.294	122.832.084.089	(14.905.171.205)	89%

Data Hasil Olahan

Pada Tahun 2012 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 2.561.776.981 atau sekitar 91% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan persentase sekitar 9% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi.

Pada tahun 2013 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 4.112. 800.588 atau sekitar 84% , dimana tingkat persentase pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat nominalnya. Terdapat selisih perbandingan persentasenya sebesar 16%. Meskipun secara persentasenya kecil , tetapi jika secara nominalnya cukup signifikan , maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Pada tahun 2014 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 2.824.241.336 atau sekitar 90%. Dalam hal ini ada pengurangan tingkat selisih sekitar 10% dari realisasi anggaran yang ditetapkan pada tahun 2014. Terlihat kenaikan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya jika diperhatikan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 penyerapan penggunaan anggaran yang tersirat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 3.379.544.459 atau sekitar 88%, dan jika

kembali melihat analisisnya kembali mengalami penurunan pemakaian anggaran. penurunan sebesar 12% dari penggunaan total realisasi anggaran yang ada.

Pada tahun 2016 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varians belanja adalah sekitar Rp. 2.026.807.841 atau sekitar 93%, kembali mengalami kenaikan efisiensi penggunaan anggaran, menyisakan perbandingan persentase sebesar 7% dari total keseluruhan anggaran yang ada.

Jika di lihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dapat dikatakan penyerapan penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja mencapai 89%. Dan jika dilihat dari kriterianya maka varians belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 93%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 84%. Walaupun dalam melakukan analisis varians belanja, hendaknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan, tetapi juga jumlah nominalnya. Walaupun secara persentase kecil, tetapi jika secara nominal cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya di bawah 70% justru bisa dinilai jadi kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, misalnya banyak program yang tidak dijalankan. Dan penurunan penggunaan anggaran juga terjadi karena pembelanjaan yang tidak sepenuhnya memakai anggaran yang ada. Oleh karena itu untuk menghindari kejadian tersebut pemerintah daerah perlu melakukan analisa standar belanja yang akurat.

Secara umum, kinerja pemerintah akan terindikasi tidak baik jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang di anggarkan. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Penghematan anggaran ditahun sekarang dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya.

D. Pembahasan

Ringkasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10

Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Bappeda Prov Su

No.	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
1	Analisis Keserasian Belanja:	
	a. Belanja Langsung	49%
	b. Belanja Tidak Langsung	51%
2	Analisis Pertumbuhan Belanja	1%
3	Analisis Efektivitas Belanja	89%
4	Analisis Efisiensi Belanja	34%
5	Analisis Varians Belanja	89%

Sumber: Data Hasil Olahan

1. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menunjukkan bahwa jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap tidak baik. Dan jika belanja pegawai lebih besar dari 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan juga anggaran belanja tidak baik. Analisis keserasian belanja daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selama tahun 2012-2016 rata-rata belanja tidak langsung sebesar 51%, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera dilihat dari analisis keserasian belanjanya lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk biaya belanja tidak langsung. Dimana belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Analisis keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara jika dilihat selama lima tahun anggaran, mengalami dampak yang tidak baik selama empat tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, hal ini dikarenakan

penggunaan anggaran lebih terfokus kepada belanja tidak langsung. Sementara pada tahun 2016 penggunaan anggaran mulai terlihat baik, karena Bappeda Provinsi Sumatera Utara mulai memberikan perhatian anggarannya terhadap belanja langsung. Dimana pada tahun ini terjadinya penghematan anggaran terhadap belanja tidak langsung guna keperluan belanja langsung. Namun jika dilihat dari total keseluruhannya Bappeda Provinsi Sumatera Utara dikatakan tidak baik dalam penggunaan anggaran khususnya terhadap keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dampaknya jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah yang berakibat berkurangnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun terhadap program kegiatan instansi. Dan adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah. Dan kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar. Seperti, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan masjid, dll. Kenaikan belanja tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah karena lebih memfokuskan kepada penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Solusi dalam mengatasi dampak tersebut adalah perlunya dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung guna dialokasikannya untuk keperluan belanja langsung. Serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Kenaikan belanja daerah perlu di lihat dari penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dll. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Pada perhitungan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami perubahan, naik dan turunnya dilihat dari segi angka persentase. Pada tahun 2012

dan 2013 mengalami penurunan dan bernilai negatif sebesar 7% dan pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.560.863.844. dan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan dan bernilai positif dengan angka persentase sebesar 14% dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 3.146.436.837. Dan untuk tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan pertumbuhan belanja dan bernilai negatif sebesar 3% dan diikuti dengan pengurangan jumlah anggaran sebesar Rp. 749.581.918. sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif sebesar 2% dan penambahan jumlah anggaran sebesar Rp. 430.888.618. sedangkan jika dilihat dari total keseluruhan pertumbuhan pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun dan juga berdasarkan kriteria analisis pertumbuhan belanjanya maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara dikatakan mengalami kenaikan pertumbuhan belanja sebesar 1% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.266.879.693.

3. Analisis Efektivitas Belanja

Dari hasil perhitungan analisis efektivitas belanja, maka dapat dilihat mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Bappeda Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan penggunaan anggaran dengan cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya berada pada kisaran 80-100%. Jika dilihat dari tingkat kriterianya maka pengguna anggaran selama lima tahun anggaran tersebut sudah cukup efektif. Dimana tingkat rasio tertinggi pada tahun 2016 sebesar 93% dan rasio terendah pada tahun 2013 sebesar 84%. Hal ini masih diatas 80%.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Untuk penilaian analisis efisiensi belanja dapat dikatakan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Utara sudah sangat baik dalam mengelola setiap penggunaan anggarannya. Karena berdasarkan kriteria dan hasil perhitungan tersebut sudah memantapkan posisinya. Dapat dilihat dari total keseluruhan analisisnya selama lima tahun yaitu sebesar 34%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka di atas 60% atau tidak melebihi anggaran belanja. Untuk hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan penghematan anggaran selama lima tahun anggaran.

5. Analisis Varians Belanja

Kinerja keuangan belanja daerah Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016 di lihat dari Varians Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan baik, karena ada hasil negatif yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. hal ini di tunjukkan dengan total perbandingan sebesar 89%. Dan juga realisasi belanja tidak melebihi dari apa yang sudah dianggarkan.

Penyebab terjadinya penghematan anggaran adalah karena realisasi anggaran tidak melebihi dari apa yang dianggarkan. Sehingga sisa penghematan ini dapat digunakan untuk tahun yang akan datang, sedangkan dampaknya adalah tidak menghabiskan APBD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara di lihat dari keserasian belanja, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah di alokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sisanya dialokasikan untuk belanja langsung. Selama lima tahun anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak baik dalam penggunaan anggarannya yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2015, karena selama empat tahun ini Bappeda Provinsi Sumatera Utara lebih terfokus terhadap pembiayaan belanja tidak langsung. Sementara pada tahun 2016 Bappeda dikatakan baik dalam penggunaan anggarannya dengan melakukan penghematan terhadap belanja tidak langsung.
2. Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara di lihat dari analisis pertumbuhan belanja, bahwa pada analisis ini pertumbuhan belanja dari tahun 2012-2016 terus mengalami perubahan. Masing-masing anggaran memiliki tingkat penyerapan anggarannya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan. Penilaian kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif dan pemanfaatan belanja sudah dilakukan secara efisien. Dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 1% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.266.879.693.
3. Kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efektivitas belanjanya selama lima tahun dari tahun 2012-2016 sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya adalah sebesar 89%, hal ini masih diatas 80%.
4. Kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah, bahwa realisasi anggaran belanja Bappeda tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa

Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah melakukan efisiensi belanja . dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya yaitu sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penghematan anggaran selama lima tahun. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka diatas 60%.

5. Kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara di lihat dari varians belanja dari tahun 2012-2016 secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini di tunjukkan dengan rata-rata target realisasi sebesar 89%. Hal ini di tunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah:
 - a. Dari segi perencanaan penganggaran, diharapkan sisi negatif yang dimaksudkan dengan adanya penghematan anggaran untuk biaya pemenuhan pada pembiayaan agar penghematan yang dilakukan dapat memberikan efek yang lebih baik dalam periode tahun berikutnya. Dalam analisis ini penghematan perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan antara realisasi dan anggaran, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi agar anggaran yang ada dan sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.
 - b. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.
 - c. Dari analisis keserasian belanja dapat disarankan, perlu adanya perhatian khusus dari instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan anggaran belanja terhadap belanja langsung.

Dimna belanja langsung ini sangat berperan terhadap kegiatan operasi instansi. Dan sebaiknya Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat mengoptimalkan kinerja instansinya dengan mengalokasikan penggunaan anggaran pada pembiayaan belanja langsung, karena ini sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran.

- d. Penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisis menunjukkan bahwa penyerapan kinerja anggaran yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara sudah memenuhi syarat efisiensi dan efektivitas yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama bagi perencanaan dan pembangunan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2012-2016. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan bappeda Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, 2009. Bandung: CV Penerbit di ponegoro.
- Andhiantoko, Hony, 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora Tahun 2007-2011*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Assidiqi, Bahrun, 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun 2008-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edy, Prasetya Gede, 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hanggreni, 2015. *Teori Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: Penerbit Caps
- Harahap, Sunarji, 2016. *Pengantar Manajemen*, Medan.
- Ikhsan, Arfan, 2012. *Analisis Laporan keuangan*, Medan: Madanetra.
- Iqbal, Muhammad, 2007. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Laporan Kinerja Instansi Bappeda
- Mahfud, Moh, 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- _____,2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mangkunegara, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Mulyadi, 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Bandung: Alfabeta.
- Nordiawan, Dedi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Perpustakaan Nasional, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

- Pilat, Juddy Julian. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2016*. Jurnal Accountabilit, 06 (01), 46.
- Renyowijoyo, Muindro, 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sayyid Qutuhub, Fi Zhilal Al-Qur'an, Juz 1.
- Sinaga, P. Sondang, 2012. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Silalahan, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sinurat, Marja, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Bandung: Pustaka Rahmat.
- Siswanto, 2011. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarjono, Hendro, 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sule, Ernie Tisnawati, 2010. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, Jakarta: Rajawali.
- Syamsi, Ibnu, 2013. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Jakarta: CV Rajawali.
- Syarif, Ibnu Mujar dan Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah Dokrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Alfabet.
- Tarigan, Azhari Akmal, 2014. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*, Medan: Citapustaka Media Perintis.

Wakhyudi, 2013. *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmiah.

Wandira, Ayu, 2015. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.

Wirawan, 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Evelina Lasrianti Aruan
2. Nim : 51143015
3. Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 22 Januari 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. SM Raja Gg Sumatera No. 30 Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 060819 Medan Berijazah tahun 2008.
2. Tamatan SMP Negeri 08 Medan Berijazah tahun 2011.
3. Tamatan MA Proyek Univa Medan Berijazah tahun 2014.
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari tahun 2014 – sekarang.

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota OSIM (2013-2014)
2. Pengurus Ikatan Pelajar Al-washliyah (2013-2014)
3. Anggota HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah)
4. Anggota KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)